

EFEKTIFITAS PENYERAPAN ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020

Oleh:

Agustin¹, Suwardi², Adi Purwanto³

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
Jawa Tengah

¹. E-mail: suwardi.unisri@gmail.com

². E-mail: achmadchoerudin77@yahoo.co.id

³. Email: Menik288@gmail.com

Abstract

Budget absorption is one of the indicators that can show the success of programs or policies carried out by the government. The realization to budget ratio reflects the absorption of the budget in carrying out various programs that have been set. With this consideration, the ability to absorb the budget by the local government can be an indicator of the performance of the city / district government. The results showed that the dominant causes of low budget absorption in the Office of Public Works and Spatial Planning of Madiun district in the fourth quarter of 2020 were the Planning factor with a percentage of 4,98% the Implementation of the Budget with a percentage of 3,69%, Human Resources with a presentation of 3,75% and procurement of services with a percentage of 3,66% % while the main factor in planning led to low budget absorption in the fourth quarter of 2020 was the presence of Government policy on budget reduction (recofusing) 4,35% Incorrect account determination so that it needs revision of the document 3,7%, Preparation of budget ceiling is too low not in accordance with market prices) 3,6%, There is a price adjustment due to government policy (escalation) 3,7%, Less effective cash budget planning causes the implementation of activities / projects not in accordance with the withdrawal plan per quarter / cash budget listed in the DPA form.3,75%

Keywords: *Effectiveness, Absorption Stack, Martani and lubis*

Pendahuluan

Penyerapan anggaran yang rendah diawal tahun dapat memberikan dampak terhadap penumpukan penyerapan diakhir tahun itu di triwulan IV. Konsep perencanaan yang kurang matang dalam perencanaan anggaran dapat menjadi masalah yang berdampak pada penentuan program kerja yang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebaiknya

memerlukan mekanisme sistem yang baik dalam proses mengelola dana publik agar tidak terjadi permasalahan yang bisa saja terjadi setiap waktu. Masalah utama dalam hal anggaran di pemerintahan adalah ketidaksesuaian penyerapan anggaran dengan targetnya. Idealnya, suatu anggaran dapat terserap secara merata sebesar 25% per triwulan atau secara akumulatif sebesar 25% pada Triwulan I, 50% pada Triwulan II, 75% pada Triwulan III, dan 100%

pada Triwulan IV atau triwulan akhir. Dengan kata lain, penyerapan anggaran yang baik dilakukan secara maksimal pada triwulan-triwulan awal sehingga di triwulan akhir pemerintah tidak kewalahan untuk melakukan penyerapan anggaran. namun tetap terjadi penumpukan dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya banyak faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV ini sebagaimana telah diteliti sebelumnya. Faktor-faktor utamanya adalah perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang atau jasa, telah diteliti oleh Sanjaya, 2020.

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran memiliki dampak terhadap peningkatan dan percepatan proses penyerapan anggaran pemerintah sehingga penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat dihindari. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun (Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh) mengidentifikasi empat faktor yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia sebagai faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian dalam kajian ini memiliki tujuan mengetahui efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan

penyerapan anggaran pada DPUPR Kabupaten Madiun.

Saridewi dkk (2015) mengemukakan permasalahan mengenai penyerapan anggaran selalu menjadi polemik hampir di berbagai daerah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tingginya target perencanaan anggaran yang ditetapkan sehingga sulit untuk direalisasikan. Kegagalan target realisasi anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja, karena anggaran yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Padahal seandainya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar, tentu pencapaian tujuan pemerintahan akan mudah untuk dilakukan. Sinaga (2016) mengemukakan rendahnya penyerapan anggaran di Indonesia merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun baik di tingkat Kementerian atau Lembaga maupun tingkat daerah, sehingga menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan masih belum memenuhi harapan. Salah satu indikasinya adalah penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran atau triwulan IV.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau

misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

Suwardi, dan Ahmad Choeruddin (2020) mengatakan: *“To bring good governance into reality, in terms of orderly, accountable, and transparent management of state assets, various approaches are needed, including structural approach leading to the improvement of government organization system and cultural approach leading to the behavior of governmental organizers, just like the characteristics of good governance”*

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan

harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha - usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, padahakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program - program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian .

Menurut Halim (2014) dalam Sudasri (2016) penyerapan anggaran adalah pencapain dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran).

Secara lebih mudah orang awam menyebutnya pencairan anggaran. Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Dilihat dari segi anggaran publik, dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2020 memiliki pagu sebesar Rp 139.270.662.116,64 dengan target Triwulan I sebesar Rp. 19.847.051.372,54. triwulan II sebesar Rp. 69.930.757.570,00, triwulan III sebesar Rp. 171.367.521,04 dan triwulan IV sebesar Rp. 45.714.154.814,48 dengan realisasi sebesar Rp 132.449.579.219,00 dengan rincian realisasi triwuklan I sebesar Rp.77.412.657,80, triwulan II sebesar Rp. 11.845.786.917, triwulan III sebesar Rp. 27.122.252.565 dan triwulan IV sebesar Rp. 93.404.127.079. Bahwa, jika dilihat realisasi keuangan terlihat adanya ketidaksesuaian yang sangat jelas antara target dan realisasi anggaran pada setiap triwulan. Seharusnya, hal tersebut dapat diantisipasi dini oleh orang-orang yang berwenang di dalam realisasi anggaran Di Dinas Pekerjaan Umum, karena memang permasalahan mengenai perbedaan yang cukup jauh antara target dan realisasi ini bukan hal baru yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Hal ini tentu menjadi tidak sesuai dengan konsep administrasi publik baik di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan seta pengendalian.

Metode penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) “Metode kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna individu dan kelompok, yang menggambarkan permasalahan sosial atau kemanusiaan. Data pada penelitian kualitatif merupakan informasi yang merupakan transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video bahan dari internet, dan dokumen - dokumen yang lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok Data-data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan serta wawancara secara langsung pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, sedangkan data sekunder diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen - dokumen serta sumber lainnya berupa informasi lainnya terutama mengenai data penyerapan anggaran belanja satuan kerja ri analisis diatas banyak faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Faktor-faktor utamanya adalah perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang atau jasa. Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh mengidentifikasi empat faktor yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia sebagai faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun Adapun alur model penelitian yang menjadi kerangka dalam penelitian ini

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1 Kerangka Dasar Pemikiran

Pembahasan

Terjadinya penumpukan penyerapan anggaran di triwulan IV yang ditunjukkan oleh besaran realisasi yang cenderung lebih besar dibandingkan triwulan lainnya. Dapat diamati pula bahwa penyerapan anggaran tidak merata pada keempat triwulan. Pada triwulan-triwulan awal, penyerapan yang terjadi sangat rendah. Penyerapan pada Triwulan I hanya sebesar 0,67%, pada Triwulan II sebesar 0,84%, pada Triwulan III sebesar 3,13%, dan pada Triwulan IV sebesar 86,27%. Tidak hanya pada tahun 2020 saja, pada tahun-tahun sebelumnya pun pola penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Madiun menunjukkan

penumpukan yang terjadi pada Triwulan IV. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, pada tahun 2020 penyerapan anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 86,27% yang lebih besar dibandingkan penyerapan pada triwulan-triwulan sebelumnya. Jumlah penyerapan pada Triwulan IV ini sudah sedikit menurun pada tahun 2020, namun tetap terjadi penumpukan dibanding triwulan-triwulan sebelumnya banyak faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV ini sebagaimana telah diteliti sebelumnya. Faktor-faktor utamanya adalah perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa, telah diteliti oleh Sanjaya, 2020.

Bulan		Rp	%
Triwulan I	Januari	0	0
	Februari	44.200.500,00	0,03
	Maret	33.212.157,80	0,21
Triwulan II	April	519.499.938,00	0,33
	Mei	5.428.031.577,00	3,45
	Juni	5.898.255.402,00	3,75
Triwulan III	Juli	7.173.885.769,00	4,56
	Agustus	8.238.389.167,00	5,23
	September	11.709.977.629,00	7,44
Triwulan IV	Oktober	29.214.471.541,91	20,98
	November	47.471.271.541,91	34,09
	Desember	16.718.383.995,00	61,01

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran DPUPR Tahun 2020 (Dalam Persentase)

Dapat dilihat pada table 1 diatas bahwa pada Triwulan IV memang terjadi penumpukan penyerapan anggaran yang ditunjukkan oleh besaran realisasi yang cenderung lebih besar dibandingkan triwulan lainnya. Dapat diamati pula bahwa penyerapan anggaran tidak merata pada keempat triwulan. Pada triwulan-triwulan awal, penyerapan yang terjadi sangat rendah. Penyerapan pada Triwulan I hanya sebesar 0,67%, pada Triwulan II sebesar 0,84%, pada Triwulan III sebesar 3,13%, dan pada Triwulan IV sebesar 86,27%. Tidak hanya pada tahun 2020 saja, pada tahun-tahun sebelumnya pun pola penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun menunjukkan penumpukan yang terjadi pada Triwulan IV. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran.

Anggaran, pada tahun 2020 penyerapan anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 86,27% yang lebih besar dibandingkan penyerapan pada triwulan-triwulan sebelumnya. Secara kumulatif terjadi kecenderungan rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja pada triwulan pertama dan kedua. Hal ini memicu tingginya tingkat realisasi di akhir tahun anggaran, ditunjukkan dengan tidak meratanya tingkat penyerapan anggaran di setiap bulannya. Penyerapan anggaran belanja yang tidak merata disebabkan karena semua jenis belanja mempunyai kecenderungan tidak merata dalam setiap bulannya. Realisasi anggaran per program kegiatan secara kumulatif dibandingkan dengan realisasi anggaran per jenis belanja per triwulan.

Tabel 2 Target dan Realisasi Anggaran Belanja DPUPR Tahun Anggaran 2020
Triwulan I

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	EFEKTIFITAS (%)	KATEGORI PENYERAPAN ANGGARAN
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	945.932.056,68	22.64.480,00	10,06%	Sangat Rendah
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	1.026.290.800,00	0	0,00%	Sangat Rendah
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	3.103.157.170,00	0	0,00%	Sangat Rendah
4	Program Jasa Konstruksi	29.231.750,00	4.750.000,00	1,39%	Sangat Rendah
5	Program Integrated Participatory Development And Management Irrigation (IPDMIP)	3.089.947.126,00	9.627.628,00	0,10%	Sangat Rendah
6	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Kelurahan	10.403.400,00	1.543.000,00	0,03%	Sangat Rendah
7	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan	4.237.108.147,00	90.351.471,00	0,10%	Sangat Rendah
8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan	90.443.172,86	0	0,00%	Sangat Rendah
9	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya	6.969.137.750,00	1.480.000,00	0,01%	Sangat Rendah
10	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	337.910.900,00	0	0,00%	Sangat Rendah
11	Program Pembinaan Lingkungan Social Bidang Infrastruktur	4.000.000,00	1.750.000,00	0,08%	Sangat Rendah
	Jumlah	19.843.562.272,40	132.151.579,00	0,67%	Sangat Rendah

Sumber Data : Dinas PUPR Kabupaten Madiun

Tabel 3 Target dan Realisasi Anggaran Belanja DPUPR Tahun Anggaran 2020
Triwulan II

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	EFEKTIFITAS (%)	KATEGORI PENYERAPAN ANGGARAN
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	453.388.050,00	525.437.930,00	23,74%	Sangat Rendah
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	81.903.550,00	22.848.070,00	1,80%	Sangat Rendah
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	5.978.193.860,00	0	0,00%	Sangat Rendah
4	Program Jasa Konstruksi	84.118.125,00	5.636.250,00	1,65%	Sangat Rendah
5	Program Integrated Participatory Development And Management Irrigation (IPDMIP)	6.090.088.020,00	31.535.277,00	0,34%	Sangat Rendah
6	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Kelurahan	3.602.264.480,00	1.543.000,00	0,03%	Sangat Rendah
7	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan	32.465.407.445,63	4.086.246.445,00	4,74%	Sangat Rendah
8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan	9.327.904.639,35	651.842.730,00	6,89%	Sangat Rendah
9	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya	9.323.866.858,00	571.415.700,00	2,92%	Sangat Rendah
10	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	445.778.660,00	0	0,00%	Sangat Rendah
11	Program Pembinaan Lingkungan Social Bidang Infrastruktur	2.077.643.944,20	1.750.000,00	0,08%	Sangat Rendah
	Jumlah	69.930.557.632,13	5.898.255.402,00	0,84%	Sangat Rendah

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Madiun

Berdasarkan table di atas Target dan realisasi anggaran belanja pada Triwulan I dan Triwulan II masuk dalam kategori “**sangat rendah**”, terlihat realisasi keuangannya ada ketidaksesuaian yang sangat jelas antara target dan realisasi anggaran. Inimenunjukkan efektifitas penyerapan anggaran yang sangat rendah dan kurang matang dalam perencanaan anggaran.

Seharusnya, hal tersebut dapat diantisipasi dini oleh orang-orang yang berwenang di dalam realisasi anggaran Di Dinas Pekerjaan Umum, karena memang permasalahan mengenai perbedaan yang cukup jauh antara target dan realisasi ini bukan hal baru yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun

Tabel 4 Target dan Realisasi Anggaran Belanja DPUPR Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	EFEKTIFITAS (%)	KATEGORI PENYERAPAN ANGGARAN
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	453.388.050,00	897.261.782,00	40,54%	Sedang
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinaamargaan	49.407.700,00	113.668.070,00	8,93%	Sangat Rendah
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	528.854.330,00	800.256.100,00	3,75%	Sangat Rendah
4	Program Jasa Konstruksi	95.454.375,00	5.636.250,00	1,65%	Sangat Rendah
5	Program Integrated Participatory Development And Management Irrigation (IPDMIP)	16.943.200,00	456.235.277,00	4,92%	Sangat Rendah
6	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Keturahan	2.289.472.900,00	1.543.000,00	0,03%	Sangat Rendah
7	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan	2.893.523.700,00	6.333.306.520,00	7,34%	Sangat Rendah
8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan	2.234.566.876,00	857.721.130,00	9,0%	Sangat Rendah
9	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.672.008.600,00	2.208.091.500,00	11,29%	Sangat Rendah
10	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	586.117.200,00	4.482.000,00	0,53%	Sangat Rendah
11	Program Pembinaan Lingkungan Social Bidang Infrastruktur	6.444.250,00	31.776.000,00	1,52%	Sangat Rendah
	Jumlah	374.193,02	11.709.977.629	3,13 %	Sangat Rendah

Triwulan III

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Madiun

Tabel 5 Target dan Realisasi Anggaran Belanja DPUPR Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	EFEKTIFITAS (%)	KATEGORI PENYERAPAN ANGGARAN
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	364.377.299,00	877.449.249,00	43%	Rendah
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebnamargaan	74.430.000,00	846.902.065,00	68,74%	Tinggi
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	1.486.221.943,00	8.362.097.160,00	83,30%	Sangat Tinggi
4	Program Jasa Konstruksi	0	6.166.500,00	29,02%	Rendah
5	Program Integrated Participatory Development And Management Irrigation (IPDMIP)	67.900.000,00	7.036.484.045,00	75,95%	Sangat Tinggi
6	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Kelurahan	230.672.569,23	1.371.851.400,00	88,29%	Sangat Tinggi
7	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan	40.608.603.664,79	71.714.646.380,00	89,41%	Sangat Tinggi
8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan	1.301.891.600,00	7.440.735.900,00	87,69%	Sangat Tinggi
9	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya	5.111.298.575,47	21.099.671.805,00	87,64%	Sangat Tinggi
10	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	75.000.000,00	263.165.500,00	96,55%	Sangat Tinggi
11	Program Pembinaan Lingkungan Social Bidang Infrastruktur	1.090.000,00	1.720.431.586,00	82,34%	Sangat Tinggi
	Jumlah	49.321.485.651,30	120.739.601.590,00	86,27%	Sangat Tinggi

Triwulan IV

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Madiun

Berdasarkan table 5 di atas Target dan realisasi anggaran belanja pada Triwulan III dan Triwulan IV mulai ada kenaikan, terlihat Triwulan III mulai mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan walaupun masih dalam kategori “**sangat rendah**”. Sedangkan Triwulan IV mengalami perlonjakan yang signifikan dan masuk dalam kategori “**sangat tinggi**”. Jadi bisa disimpulkan bahwa efektivitas pada Triwulan I dan Triwulan II sangatlah rendah. Penyerapan anggaran yang

rendah dapat memberikan dampak terhadap realisasi kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan kurang matangnya perencanaan anggaran atau bisa juga karena faktor-faktor lain misal pelaksanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa. Pada Triwulan III Efektivitas penyerapan anggaran mulai mengalami peningkatan walaupun masih dalam kategori rendah dan pada Triwulan IV efektivitas penyerapan anggaran meningkat secara drastis

NO	Faktor Penyebab	Penelitian						Prosentase Terakhir
		STS (%)	TS (%)	K (%)	S (%)	RSS (%)	Total	
1	Perencanaan	0	5,20	10,8	64,6	19	99,6	4,98
2	Pelaksanaan Anggaran	0	4,8	10,8	42,2	16	73,8	3,69
3	Sumber Daya Manusia	0	7,2	12,6	35,2	20	75	3,75
4	Pengadaan Barang/Jasa	0	16,2	16,2	40,8	0	73,2	3,66
	Jumlah	0	33,4	50,4	163,6	49	321,6	16,08

Tabel 6 Faktor Penyebab Anggaran Pada Triwulan IV Tahun 2020

Sumber Data: DPUPR Kabupaten Madiun

Bisa dilihat dari tabel 6 diketahui bahwa faktor Penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada Triwulan IV Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun adalah faktor perencanaan dengan presentasi sebesar 4,98%, faktor yang kedua adalah pelaksanaan anggaran dengan prosentasi 3,69%, faktor ketiga adalah

sumber daya manusia dengan prosentase 3,75%, faktor keempat adalah pengadaan barang dan jasa dengan prosentasi 3,66% Artinya faktor penyebab paling dominan terhadap rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan IV tahun anggaran 2020 adalah faktor perencanaan.

Table 7 persepsi responden terhadap rencana anggaran di DPUPR

No	Pernyataan	STS (%)	S (%)	K (%)	S (%)	SS (%)	Rata-Rata Skor
1	Adanya kebijakan pemerintah tentang pengurangan anggaran (refocusing)	0	0,8	1,80	4,8	10	4,35
2	Salah penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen	0	0,8	3,0	11,0	0	3,7
3	Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah tidak sesuai dengan harga pasar)	0	1,2	1,2	12,0	0	3,6
4	Adanya penyesuaian harga karena adanya kebijakan pemerintah (eskalasi)	0	1,6	1,8	6,4	5	3,7
5	Perencanaan anggaran kas yang kurang efektif menyebabkan pelaksanaan kegiatan / proyek tidak sesuai rencana penarikan dana per triwulan / anggaran kas yang tercantum dalam formulir DPA-SKPD	0	0,8	3	7,2	4	3,75
	Jumlah	0	5,20	10,8	64,6	19	4,98

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Madiun

1,0 – 1,8 = sangat tidak setuju

3,4 – 4,2 = setuju

1,8 – 2,6 = tidak setuju

4,2 – 5,0 = Sangat Setuju

2,6 – 3,4 = netral

Berdasarkan table 7 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap perencanaan anggaran yang dijalankan di DPUPR ada (0%) responden yang menjawab setuju (STS), (5,20%) responden menjawab setuju (TS), (10,8%) responden menjawab Netral (K), (64,9%) responden menjawab setuju (TS) dan 19 % responden menjawab Sangat

setuju. Salah satu prinsip penganggaran adalah berbasis kinerja, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja yang ditetapkan terlebih dahulu. Idealnya kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan baik jenis maupun jumlahnya dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi organisasi.

No	Pernyataan	STS	TS	K	S	SS	Rata-Rata Skor
1	Sumber Pendapatan Transfer yang baru Turun di Akhir Tahun	0	0,8	1,2	8	5	3,75
2	Adanya penyedia barang/jasa (rekanan) yang mengajukan pencairan sekaligus di akhir tahun, tidak bertahap sesuai dengan termin pembayaran yang ada dalam dokumen kontrak. Menyebabkan pencairan dana tidak sesuai rencana anggaran kas	0	0,4	2,4	8,8	4	3,9
3	Kehati - hatian dalam membelanjakan anggaran	0	1,2	1,2	9,6	3	3,75
4	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai schedule	0	1,2	3	8	2	3,55
5	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	0	1,2	3	8	2	3,55
	Jumlah	0	4,8	10,8	42,4	16	3,7

Table 8 persepsi responden terhadap rencana anggaran di DPUPR

1,0 – 1,8 = sangat tidak setuju

3,4 – 4,2 = setuju

1,8 – 2,6 = tidak setuju

4,2 – 5,0 = Sangat Setuju

2,6 – 3,4 = netral

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap pelaksanaan kegiatan yang dijalankan di DPUPR ada (3,75%) responden yang menjawab sangat tidak setuju (TS), (3,9%) responden menjawab tidak setuju (STS), (3,75%) responden yang menjawab netral (K),

(42,2%) responden menjawab setuju dan (16%) responden menjawab sangat setuju (SS). Pelaksanaan anggaran pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya. Dalam penyerapan anggaran berperan sangat penting mulai dari awal proses

perencanaan sampai dengan penyerapan anggaran. Proses pelaksanaan anggaran dimulai sejak disetujuinya KUA-PPAS oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

No	Pernyataan	STS	TS	K	SS	SS	Rata-Rata Skor
1	Terjadinya mutasi pegawai/Rotasi Pegawai	0	1,6	1,2	9,6	4	4,1
2	Kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang pekerjaan/Kualitas	0	1,2	3	8	2	4,1
3	Pegawai kebiasaan menunda pekerjaan lengkap saat pengajuan Pembayaran	0	1,2	2,4	7,2	4	3,7
4	Pegawai kurang memiliki kemampuan dalam tanggung jawab terhadap pekerjaannya	0	8	3	4,8	5	3,60
5	Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen di SKPD	0	1,6	3	5,6	5	3,4
Jumlah		0	7,2	12,6	35,2	20	3,75

Table 9: Persepsi responden terhadap rencana anggaran di DPUPR

Sumber:

Data

Primer

1,0 – 1,8 = sangat tidak setuju

3,4 – 4,2 = setuju

1,8 – 2,6 = tidak setuju

4,2 – 5,0 = Sangat Setuju

2,6 – 3,4 = netral

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap Sumber daya manusia di DPUPR responden ada (0%) responden menjawab setuju (STS), (7,2%) responden menjawab tidak setuju (TS), (12,6%) responden menjawab netral (K), (35,2%)

responden menjawab setuju (S) dan (20% responden menjawab Sangat setuju (SS). Kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang pekerjaan/Kualitas SDM yang paling berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Table 10 persepsi responden terhadap rencana anggaran di DPUPR

No	Pernyataan	STS	TS	K	S	SS	Rata-Rata Skor
1	Terlambatnya penyusunan jadwal	0	0,8	3,6	9,6	0	3,5
2	Terlambatnya penetapan pemenang	0	2,4	3	8,8	0	3,55
3	Adanya Pengulangan Lelang (Re Tender)	0	3,2	3,6	4,8	0	2,9
4	Keterlambatan Penandatanganan Kontrak	0	3,2	2,4	8,8	0	3,6
5	Adanya addendum Kontrak	0	1,2	3,6	8,8	0	3,4
	Jumlah	0	16,2	16,2	40,8	0	3,66

Sumber: Data Primer

1,0 – 1,8 = sangat tidak setuju

3,4 – 4,2 = setuju

1,8 – 2,6 = tidak setuju

4,2 – 5,0 = Sangat Setuju

2,6 – 3,4 = netral

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap Pengadaan Barang Jasa di DPUPR responden ada (0%) responden menjawab setuju (STS), (16,2%) responden menjawab setuju (TS) , (16,2%) responden menjawab netral (K) , (40,8%) responden menjawab setuju (S) dan (0%) .responden menjawab Sangat setuju (SS). Keterlambatan Penandatanganan Kontrak yang paling berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.sebesar 3,6%.

Penutup

Kesimpulan Dan Saran

1. Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2020 triwulan I sebesar 0,67 % triwulan II sebesar 0,84% triwulan III sebesar 3,13 % dan

triwulan IV sebesar 86,27 %adalah factor Perencanaan dengan presentasi sebesar 4,9 faktor yang kedua adalah pelaksanaan anggaran dengan prosentasi 3,7%, faktor ketiga adalah factor sumber daya manusia dengan prosentase 3,75%, dan faktor keempat adalah pengadaan barang jasa dengan prosentasi 3,66%.

2. Faktor – faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan IV Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun adalah:
 - a. Faktor perencanaan 4,9 %
 - b. Faktor Pelaksanaan sebesar 3,7%
 - c. Faktor Sumber Daya Manusia sebesar 3,75 %
 - d. Faktor Pengadaan Barang Jasa sebesar 3,66 %

3. Agar dilakukannya peningkatan kualitas perencanaan penyusunan anggaran, meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur, berkompeten sesuai latar belakang pendidikan dan keahlian.penetapan panitia pengadaan barang jasa sebaiknya dilakukan lebih awal sesaat setelah anggaran ditetapkan oleh DPRD sehingga PPK dan PPTK bisa melaksanakan kegiatan diawal tahun, dan pengajuan pembayaran (termyn) disesuaikan dengan anggaran kas yang telah ditentukan di DPA

Daftar pustaka

- Halim, A (2014). *Manajemen Keuangan Sector Public Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah, Salemba Empat: Jakarta*
- Kurniawan, Agung (2005), *Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan, Yogyakarta*
- Kuswoyo, Iwan Dwi.2012. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Suwardi, Achmad Choeruddin (2021) *The Optimization Of Local Government Asset Utilization In Supporting Local Income (Pad): An Empirical Study In Salatiga City, Central Java, Indonesia*. Journal Of Southwest Jiaotong University Vol. 56 No. 5 Oct. 2021. ISSN: 0258 – 2724. DOI:10.35741/issn.0258-2724.56.5.37 <https://www.jsju.org/index.php/journal/article/view/1045>
- S.P.Sagian (1978), *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*, Jakarta: Bima Aksana
- Undang-Undang Republik Indonesia (2003), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003* dari <https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2012/12/filestorage1386161145.pdf>